

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Deddy Soemantri Yusuf (2009) mengungkapkan bahwa kinerja (performance):

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaansuatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misidan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Mangkunegara (2005:15) menyatakan bahwa:

kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok.

Tujuan pengukuran kinerja pada sektor publik menurut Mahmudi (2007) adalah:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi  
Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Menyediakan sarana 13 lajuran pegawai  
Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi serta mewujudkan visi dan

misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya  
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Penerapan system pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward* (misalnya: kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi) atau *punishment* (misalnya: pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran).
5. Memotivasi pegawai  
Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas publik  
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerjalainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan, keluaran, dan hasil. Dimana ketiga indikator itu merupakan pelaksanaan *value for money*. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 masukan (*input*) adalah sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya. Sedangkan keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Dan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return On Investment (ROI)* menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut(Munawir, 2004:89). Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada *Net Profit Margin (NPM)* adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu (Dedy Soemantri Yusuf, 2009).

## **2. Teknologi Informasi**

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

O'Brien (2006:28) menyatakan bahwa:

teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson et.al. (1991) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Sistem informasi dapat diartikan sebagai pengguna teknologi komputer yang meliputi perangkat *Hardware* dan *software* yang telah dirancang untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang berguna kepada pengguna informasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan (Bodnar dan Hopwood, 2006:6). Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003:5) dalam Astuti Handaiyani Siregar dan I Ketut Suryanawa (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat di mana seorang individu menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan teknologi informasi. Faktor sosial ditunjukkan dari besarnya dukungan rekan kerja, atasan, dan organisasi. Menurut Triandis (1980) dalam Tjhai (2003:7) faktor sosial memiliki hubungan positif dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika mendapat dukungan dari individu lainnya.

2. Affect (perasaan individu)

Dapat diartikan bagaimana perasaan individu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi. Agus (2006) membuktikan bahwa perasaan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi sistem informasi. Hal ini berarti jika

individu senang melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi, maka individu tersebut akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

3. Kesesuaian tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan tugas. Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003:18) memperoleh hubungan yang positif dan signifikan antara kesesuaian tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika teknologi informasi yang diterapkan sesuai dengan tugas mereka.

4. Konsekuensi jangka panjang

Konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karier dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Untuk beberapa individu, motivasi untuk menggunakan teknologi informasi dapat dihubungkan dengan rencana pada masa yang akan datang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Beatty (1986) dalam Tjhai (2003:9) menemukan hubungan positif antara konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi jika output yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang seperti peningkatan karier dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting.

5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Triandis (1980) dalam Tjhai (2003:9) kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektif yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi.

6. Kompleksitas

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Penelitian yang dilakukan Tornatzky dkk. (1982) dalam Tjhai (2003:8) menemukan bahwa semakin kompleks inovasi yang dilakukan semakin rendah tingkat penerimaan. Jika pemanfaatan teknologi informasi dapat ditunjukkan dalam konteks penerimaan atas inovasi, maka hasil ini mendukung sebuah hubungan yang negatif antara kompleksitas dengan pemanfaatan teknologi informasi.

### 3. Good Governance

*Good Governance* dibentuk dari dua suku kata, yaitu *Good* yang berarti baik, dan *Governance* yang berarti pemerintahan. Secara harfiah *Good Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Menurut Loina Lalola dalam Depdagri Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum (2006: 1-2) menterjemahkan Governance menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Menurut Trisnaningsih (2007):

munculnya konsep *Good Governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan stakeholder-nya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku diluar negara yang ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum seperti penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian yang konstruktif diantara negara, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Oleh itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar.

Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2002:18) dalam Prima Yuda (2012) karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi:

1. *Participation.*
2. *Rule of law.*
3. *Transparency.*
4. *Responsiveness.*
5. *Consensus of orientation.*
6. *Equity.*
7. *Efficiency and effectiveness.*
8. *Accountability.*
9. *Strategic vision.*

Pelaksanaan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik.

#### **4. Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi (2001:180) pengendalian intern adalah :

Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

### 3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* dalam Moeller, (2009:32) adalah:

Suatu proses yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Jogiyanto (2000:373) mendefinisikan sebagai berikut:

Pengendalian intern meliputi struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan didalam suatu perusahaan untuk tujuan menjaga harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan, dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan- kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern ( Mulyadi 2002:163) :

1. Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan aset.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern, SPIP

(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam UU No. 60 tahun 2008 terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian.
2. Penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan pengendalian intern.

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), 1997 dalam Sawyer, (2005:57) pengendalian Internal adalah:

suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan.

Karakteristik yang baik akan mendukung terciptanya pengendalian internal yang efektif. Rencana organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat, praktek yang sehat serta kualitas pengamat yang cocok harus terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Kelancaran pekerjaan akan memudahkan pengendalian internal terlaksana dalam mencapai tujuan. Keterbatasan yang terdapat dalam pengendalian internal dapat mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut Mulyadi (2002 : 181) adalah:

1. Kesalahan dalam pertimbangan.
2. Gangguan.
3. Kolusi.
4. Pengabaian oleh manajemen.
5. Biaya lawan manfaat.

## 5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan seharusnya memudahkan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data, dan menginterpretasikan data tersebut. Data dalam informasi tersebut seharusnya merupakan data yang terintegrasidari seluruh unit organisasi sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas dalam organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang secara umum adalah terjadi efisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Jika teknologi informasi yang ada mampu dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah (Irine Chintya, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan (Azwir Nasir dan Ranti Oktari, 2011).

## 6. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

*Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Nur Azlinadan Ira Amelia, 2014).

Pemerintah terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai bentuk dari penerapan *good governance*.

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Terciptanya *good governance* terhadap kinerja pemerintah apabila pemimpin organisasi, struktur organisasi dan sumber daya manusia menjalankan menjalankan tugas dengan bersih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik (Prima Yuda, 2012).

## **7. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Demi terciptanya kinerja yang maksimal maka juga harus ada pengendalian internal yang kuat. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2002 : 180) tujuan dari pengendalian intern terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Keandalan informasi keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

## **8. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.I**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

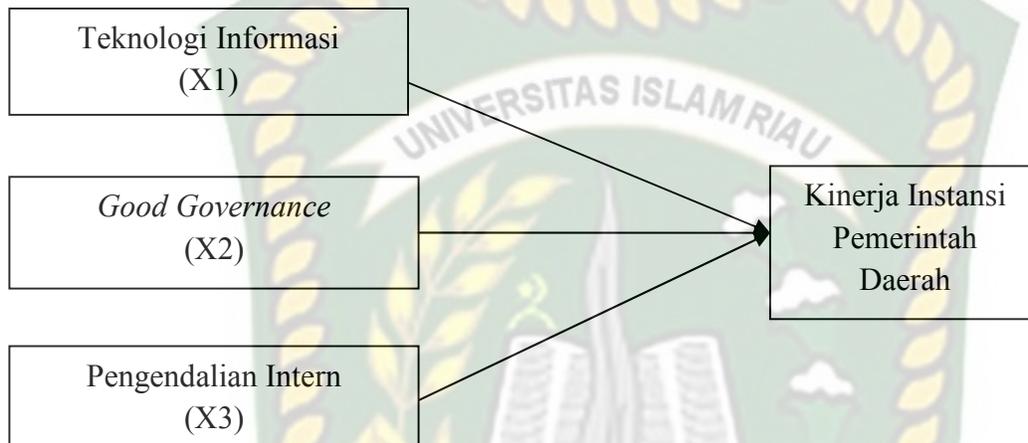
No	Nama Peneliti / tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil
1	Astuti Handaiyani Siregar dan I Ketut Suryanawa (2008)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak.	Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya. Dependen: Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak.	Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak.
2	Iktria Susanti (2014)	Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern pemerintah terhadap kinerja organisasi	Independen: Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern. Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah	good governance, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi ,
3	Irine Chintya (2010)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.	Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
4	Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2011)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap	Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern.	Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh dalam peningkatan

			Kinerja Instansi Pemerintah.	Dependen: Instansi pemerintah.	Kinerja Instansi Pemerintah, namun Pengendalian Intern berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.
5	Prima (2012)	Yuda	Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Governancedan</i> Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi.	Independen: Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Intern. Dependen: Kinerja Organisasi.	Pelaksanaan <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi.
6	Nur Azlina dan Ira Amelia(2014)		Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah.	Independen: Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Intern. Dependen: Kinerja Pemerintah.	<i>Good Governancedan</i> Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..
7	Deddy Soemantri Yusuf (2009)		Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	Independen: Pengaruh <i>Good Governance</i> . Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah.	Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## 9. Model Penelitian

Hubungan antara Teknologi Informasi, *Good Governance*, Pengendalian Intern, terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada penelitian ini dapat digambarkan dalam model dibawah ini:

**Gambar I.I  
Model Penelitian**



## **B. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2012:93). Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H1: Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

H2: *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

H3: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

H4: Teknologi Informasi, *Good Governance*, dan pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**